KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Sains Student Research (JSSR)
Vol.4, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3025-9851, p-ISSN : 3025-986X, Hal 971-982
DOI : https://doi.org/10.61722/jssr.v4i6.13181

Konstruksi Wacana Pancasila pada Konten Instagram BPIP: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Muhammad Khatam Muyassar[1], Rafif Anggaraksa Rusvi[2], Pirgi Pirmansyah[3], Ihksan Ahmad[4]
[1-4] Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
*Penulis Korespondensi: tamkhatammuyassar@gmail.com[1], rapgarr@gmail.com[2], pirgipirmasnyah0627@gmail.com[3], ikhsan@untirta.ac.id[4]

Abstract. *This study examines how BPIP's official Instagram account (@bpipri) constructs Pancasila discourse. Using a qualitative approach and Fairclough's critical discourse analysis (text, discursive practice, sociocultural practice), we analyze six posts and their comments from 28 September to 20 October 2026. We selected the posts through convenience sampling. Five of the six posts mention Pancasila or its principles and link them to everyday topics, using the pattern "not merely X, but Y" (potential use of writing assistance tools) to widen a topic into a shared value. Conversational language makes normative standards sound like invitations. Audiences responded little, averaging 82.8 likes and 1.5 comments per post, and emojis made up most of the comments. The findings describe how BPIP constructs discourse in the analyzed posts. They do not show how audiences received it.*

Keywords: *Pancasila, BPIP, Instagram, critical discourse analysis, Fairclough*

Abstrak. *Penelitian ini menjelaskan cara akun Instagram resmi BPIP (@bpipri) mengonstruksi wacana Pancasila. Peneliti memakai pendekatan kualitatif dan analisis wacana kritis Fairclough (teks, praktik wacana, praktik sosial-budaya) untuk menganalisis enam unggahan periode 28 September–20 Oktober 2026 beserta komentarnya. Peneliti memilih unggahan dengan convenience sampling. Lima dari enam unggahan menyebut Pancasila atau nama sila langsung dan mengaitkannya dengan topik keseharian. Pola "bukan sekadar X, melainkan Y" (potensi alat bantu tulis) muncul di lima unggahan dan memperluas topik menjadi nilai bersama. Bahasa percakapan membuat standar normatif terdengar sebagai ajakan. Audiens merespons sedikit: rata-rata 82,8 like dan 1,5 komentar per unggahan, dan emotikon mendominasi komentar. Temuan menggambarkan cara BPIP mengonstruksi wacana dalam unggahan yang dianalisis. Temuan tidak menunjukkan bagaimana audiens menerimanya*.

Kata kunci: *Pancasila, BPIP, Instagram, analisis wacana kritis, Fairclough*

1. LATAR BELAKANG

Pancasila menjadi dasar negara, sekaligus juga terus dibahas dan dimaknai secara berbeda oleh berbagai pihak (Kim, 2024). Di era digital, media sosial memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka tentang Pancasila (Nabila et al., 2023). Negara, kelompok masyarakat, maupun warga dapat memiliki penafsiran masing-masing (Pesurnay, 2018).

Naskah Masuk:15 Oktober 2026; Revisi: 16 Oktober 2026; Diterima: 17 Oktober 2026; Terbit: 22 Oktober 2026

Salah satu pihak yang terlibat dalam pembahasan Pancasila di media sosial adalah negara, melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018, BPIP bertugas membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila (Republik Indonesia, 2018). Tugas ini membuat BPIP berhadapan dengan berbagai pandangan tentang Pancasila di masyarakat. Dalam hal ini, Mustapa et al., (2024) mengingatkan bahwa jika hanya satu tafsir yang dianggap benar, ruang untuk memahami Pancasila dengan cara lain dapat menjadi terbatas. Mereka juga mengingatkan bahwa BPIP berisiko mengulangi pola penataran P4 jika menjalankan tugasnya terlalu ketat. Pancasila diharapkan dapat dipahami dan dimaknai secara terbuka oleh masyarakat yang memiliki latar belakang dan pandangan beragam. Karena itu, BPIP sebagai lembaga negara yang bertugas membina ideologi Pancasila perlu menyampaikan pesan yang membantu masyarakat memahami nilai-nilai Pancasila tanpa membatasi ruang penafsiran.

Dalam konteks itu, BPIP menggunakan Instagram sebagai salah satu cara berkomunikasi dengan masyarakat (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2021). Dalam berkomunikasi di ruang ini, BPIP tampak menyesuaikan diri dengan gaya wacana khas media sosial. Maksudnya seperti menggunakan bahasa percakapan, kuis, dan tema keseharian. Tetapi cara pesan ideologis disampaikan bukanlah hal yang netral. Entman (2006) menjelaskan bahwa pesan dibentuk melalui pemilihan dan penonjolan aspek tertentu. Sementara itu, Schrøder (1998) menjelaskan bahwa gaya bahasa dapat mempengaruhi hubungan antara lembaga dan masyarakat. Karena itu, cara BPIP menyampaikan pesan tentang Pancasila melalui Instagram layak dikaji lebih lanjut.

Pengamatan awal pada akun Instagram resmi @bpipri (sekitar 103 ribu pengikut per 21 Oktober 2026) menunjukkan bahwa akun ini mengunggah berbagai konten dengan bahasa santai. Topiknya beragam, mulai dari peringatan hari tertentu, keterbukaan informasi publik, dan kegiatan kelembagaan hingga gotong royong, etika berpendapat, dan negara hukum. Interaksi pada unggahan yang diamati relatif rendah dibandingkan jumlah pengikutnya: enam unggahan pada periode 28 September–20 Oktober 2026 rata-rata memperoleh 82,8 like dan 1,5 komentar.

Pengamatan awal tersebut belum cukup untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila disampaikan, baik secara langsung maupun tersirat, serta bagaimana pilihan bahasa dan visual membentuk makna dalam konten tersebut.

Kajian yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat dari tiga arah. Mustapa et al., (2024) membandingkan P4 pada era Orde Baru dengan BPIP melalui telaah pemberitaan. Mereka menilai bahwa pelembagaan tafsir tunggal berpotensi menutup keterbukaan ideologi Pancasila, tetapi tidak mengkaji konten komunikasi BPIP. Siregar (2022) mengamati media sosial BPIP pada 2021 dan menemukan rendahnya keterlibatan pengikut. Namun, kajiannya berfokus pada popularitas dan interaksi akun, dan tidak menelaah bagaimana konten membangun makna. Dari sisi metode, Prayoga et al., (2020) menggunakan model Fairclough untuk menganalisis pemberitaan tentang pernyataan Kepala BPIP. Dari kajian yang ditelaah penulis, belum ditemukan penelitian yang menganalisis konten media sosial resmi BPIP menggunakan analisis wacana kritis Fairclough.

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Fairclough, yang memandang wacana sebagai praktik sosial dan menganalisisnya melalui tiga dimensi: teks, praktik wacana, dan praktik sosial-budaya (Frawley, 1993). Karena objek yang dikaji berupa konten visual berbentuk slide, unsur visual seperti foto, ilustrasi, dan tata letak dibaca bersama teks sebagai satu kesatuan makna (Faigley et al., 2002). Pendekatan kritis digunakan untuk melihat bagaimana relasi kuasa bekerja dalam wacana, termasuk ketika otoritas disampaikan melalui bahasa yang akrab dan tema keseharian (Simpson et al., 2018). Penelitian ini tidak berangkat dari pengandaian bahwa wacana BPIP bermasalah.

Penelitian ini berangkat dari tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konten Instagram @bpipri menyampaikan nilai-nilai Pancasila melalui tulisan dan gambar, baik secara eksplisit maupun tersirat. Kedua, bagaimana praktik wacana konten tersebut berlangsung, yang mencakup gaya bahasa percakapan, penggunaan format konten lain, ajakan berinteraksi kepada audiens, dan tanggapan audiens pada kolom komentar. Ketiga, bagaimana kedudukan BPIP sebagai lembaga negara dan konteks komunikasi pemerintah dengan masyarakat melatarbelakangi cara penyampaian pesan tersebut. Ketiga pertanyaan ini dikaji menggunakan analisis wacana kritis Fairclough.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis (Mullet, 2018). Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis model Fairclough, yang memandang wacana sebagai bagian dari kehidupan sosial. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial-budaya (Frawley, 1993). Penelitian ini bersifat eksploratif dan memperlakukan setiap unggahan sebagai kasus untuk menunjukkan bagaimana wacana Pancasila dikonstruksi; pola umum pada seluruh konten akun tidak diukur.

Objek penelitian ini adalah unggahan akun Instagram resmi BPIP (@bpipri) beserta komentar pada unggahan tersebut. Penelitian berfokus pada platform Instagram saja. Bahan utama penelitian berupa slide, keterangan (*caption*), tagar, jumlah like dan komentar, serta isi komentar. Adapun alat yang digunakan meliputi peramban web, tangkapan layar, dan lembar kerja koding.

Data penelitian terdiri atas enam unggahan akun BPIP yang terbit pada 28 September–20 Oktober 2026. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian tidak mencakup seluruh unggahan dalam periode tersebut. Sampel dipilih menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu memilih unggahan yang mudah diakses (Etikan et al., 2016). Tim memilih enam unggahan terbaru yang dapat diakses saat pengumpulan data, tanpa kriteria tertulis sebelumnya. Unggahan tersebut mencakup tema peringatan hari tertentu, keterbukaan informasi publik, kegiatan kelembagaan, gotong royong, etika berpendapat, dan negara hukum. Data yang dicatat meliputi tanggal terbit, tema, penyebutan Pancasila atau silanya secara eksplisit pada slide dan keterangan, serta jumlah like dan komentar. Jumlah like dan komentar dicatat sesuai tampilan akun publik pada 21 Oktober 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi berupa tangkapan layar yang disertai catatan tanggal dan waktu pengambilan, observasi nonpartisipan terhadap unggahan dan komentar, serta studi dokumen terhadap Perpres Nomor 7 Tahun 2018 , pemberitaan, dan literatur terkait (Republik Indonesia, 2018).

Sebelum analisis, para peneliti memiliki kesan awal bahwa komunikasi BPIP cenderung normatif. Kesan ini bersifat subjektif dan tidak dijadikan dasar temuan. Untuk

mengurangi pengaruhnya, kategori pengodean ditetapkan sebelum analisis, setiap unggahan dikode oleh ketiga peneliti, dan setiap klaim dalam pembahasan harus didukung bukti dari teks unggahan.

Analisis teks mencakup pilihan kata, metafora, modalitas, penggambaran aktor, dan struktur narasi, serta fungsi representasi, relasi, dan identitas dengan unsur visual dibaca bersama teks (Schrøder, 1998). Analisis praktik wacana berfokus pada produksi dan penyebaran konten oleh BPIP, tanggapan khalayak melalui komentar, serta hubungan konten dengan wacana lain (Schrøder, 1998). Sementara itu, analisis praktik sosial-budaya mencakup konteks unggahan, posisi dan mandat BPIP, serta kondisi masyarakat (Schrøder, 1998).

Dalam penelitian ini, nilai Pancasila dikategorikan eksplisit jika kata Pancasila atau nama sila disebut pada sampul, slide, atau keterangan. Logo lembaga dan tagar tidak dihitung. Nilai dikategorikan tersirat jika tidak disebut secara langsung, tetapi tema konten dapat dikaitkan dengan nilai Pancasila berdasarkan alasan yang ditulis dan disepakati oleh ketiga peneliti. Jika kaitannya tidak dapat dijelaskan dengan alasan yang kuat, konten dikategorikan tidak tampak.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi (Frawley, 1993). Data dicatat dalam tabel, kemudian ditafsirkan berdasarkan konten dan komentar sebelum dihubungkan dengan konteks sosial dan kelembagaan. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan konten, komentar, dan dokumen, serta melakukan pengecekan silang hasil pengodean oleh ketiga peneliti (Golafshani, 2003). Identitas pengguna yang komentarnya dikutip disamarkan menggunakan kode (Hakim & Rabeh, 2026). Karena penelitian terbatas pada satu akun, satu periode, dan enam unggahan yang dipilih tanpa kriteria yang ditetapkan sebelumnya, temuan tidak digeneralisasi ke seluruh konten BPIP dan hanya menggambarkan unggahan yang dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Enam unggahan @bpipri yang dianalisis terbit pada 28 September–20 Oktober 2026 dengan tema yang beragam (Tabel 1). Lima unggahan menyebut Pancasila atau nama sila secara eksplisit pada slide atau keterangan. Sementara itu, unggahan P3 tentang pemusnahan arsip oleh humas BPIP tidak menyebut Pancasila atau sila maupun

mengaitkan isi pesannya dengan nilai-nilai Pancasila. Penyebutan hanya muncul melalui tagar #SalamPancasila dan visual salam Pancasila. Berdasarkan kriteria penelitian, unggahan ini dikategorikan sebagai tidak tampak.

Tabel 1. Ringkasan enam unggahan @bpipri yang dianalisis

Kode	Tanggal	Tema	Nilai Pancasila	Like	Komentar
P1	28 Sep 2026	Hari Kereta Api: sejarah dan layanan publik	Eksplisit (sila 3 dan 5)	83	3
P2	28 Sep 2026	Hak atas informasi publik (Hari Hak untuk Tahu Internasional)	Eksplisit (sila 4)	46	1
P3	7 Okt 2026	Pemusnahan arsip inaktif (laporan kegiatan humas)	Tidak tampak	162	1
P4	20 Okt 2026	Gotong royong (Mappalette Bola dan Mapalus)	Eksplisit (sila 2 dan 3)	46	1
P5	19 Okt 2026	Perbedaan pendapat dan etika berpendapat	Eksplisit (sila 2, 3, 4, dan 5)	39	1
P6	19 Okt 2026	Pancasila dan negara hukum	Eksplisit (Pancasila dan nilai kelima sila)	121	2
		Rata-rata		**82,8**	**1,5**

Jumlah like berkisar 39–162 (rata-rata 82,8) dan jumlah komentar 1–3 (rata-rata 1,5). Like terbanyak diperoleh P3 (162) dan P6 (121). Dibandingkan jumlah pengikut akun yang sekitar 103 ribu, rata-rata like tersebut setara sekitar 0,08 persen.

Dari sembilan komentar yang tercatat, enam berasal dari satu akun komunitas (K1) yang memberikan emotikon hati pada setiap unggahan tanpa teks. Tiga komentar lainnya berasal dari akun berbeda. K2 mengkritik BPIP terkait perilaku pegawainya pada P1, tetapi tidak menjelaskan peristiwa yang dimaksud. K3 memuji Pancasila dalam bahasa

Inggris sebagai landasan dan warisan yang dikenal dunia. Sementara itu, K4 pada P6 menyatakan bahwa masyarakat menantikan suara BPIP dan menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Identitas seluruh akun disamarkan menggunakan kode sesuai prosedur etik penelitian.

Dimensi Teks

Pada dimensi teks, keenam unggahan mengaitkan Pancasila dengan topik yang berbeda. P1 membahas persatuan dan keadilan sosial melalui sejarah kereta api; P2 membahas keterbukaan informasi dan musyawarah; P3 menekankan tata kelola yang tertib dan akuntabel; P4 mengaitkan gotong royong dengan kemanusiaan dan persatuan; P5 membahas etika berpendapat dan perbedaan; sedangkan P6 menempatkan Pancasila sebagai dasar negara hukum dan pembatas kekuasaan.

Bahasa yang digunakan juga beragam. P4 dan P5 memakai bahasa percakapan, seperti “bareng-bareng”, “gak tinggal diam”, dan “Gapapa dong”, serta contoh keseharian seperti “DNA bangsa” dan perdebatan tentang bubur diaduk. P2 dan P6 menggunakan pertanyaan untuk menarik perhatian pembaca, sedangkan P3 memakai bahasa formal seperti “tertib”, “akuntabel”, dan “efisien”. Selain itu, pola “bukan (sekadar) X, melainkan Y” muncul pada P1, P2, P3, P5, dan P6 untuk memperluas makna topik yang dibahas.

Dimensi Praktik Diskursif

Pada praktik diskursif, keenam unggahan disajikan dalam bentuk slide yang dilengkapi caption dan tagar. Beberapa unggahan memanfaatkan momentum tertentu, seperti Hari Kereta Api pada P1 dan Hari Hak untuk Tahu Internasional pada P2. P3 dan P6 berisi dokumentasi kegiatan lembaga, sedangkan P4 dan P5 mengangkat contoh dari kehidupan sehari-hari. P3 disajikan seperti laporan kegiatan humas, dengan gaya pemberitaan kelembagaan, tanpa sapaan atau ajakan kepada audiens. P2 juga tidak memuat ajakan secara langsung. Sebaliknya, P5 mengajak audiens menuliskan pilihan mereka di kolom komentar, sedangkan P6 mengajak audiens menyimpan dan membagikan unggahan. Tagar #SalamPancasila digunakan pada P2, P3, P5, dan P6.

Respons audiens terhadap keenam unggahan relatif terbatas. Jumlah like berkisar antara 39–162, sedangkan jumlah komentar berkisar antara 1–3. Dari sembilan komentar

yang ditemukan, enam berupa emotikon hati dari akun K1. Tidak ada komentar yang menjawab ajakan pada P5 untuk menuliskan pilihan di kolom komentar. Tiga komentar lainnya berisi kritik terhadap BPIP (K2, P1), pujian terhadap Pancasila (K3, P1), dan harapan agar BPIP menyampaikan pendapatnya (K4, P6). Data ini belum cukup untuk memastikan apakah audiens memahami, menerima, atau menyetujui pesan yang disampaikan dalam unggahan.

Dimensi Praktik Sosial-Budaya

Pada praktik sosial-budaya, wacana Pancasila dikaitkan dengan konteks yang berbeda-beda: sejarah dan layanan publik (P1), tata kelola dan demokrasi (P2), citra kelembagaan (P3), identitas budaya dan solidaritas nasional (P4), etika komunikasi di ruang publik (P5), dan hukum tata negara (P6). Pada P4, tradisi lokal Bugis dan Minahasa diangkat menjadi simbol gotong royong sebagai nilai nasional (Mansi, 2018). Pada P1, P2, P3, dan P6, unggahan lebih menonjolkan nilai yang diharapkan daripada bukti pelaksanaannya, sehingga kaitan dengan sila dipahami sebagai konstruksi pesan BPIP, dan belum menjadi bukti bahwa nilai tersebut telah terwujud. Pada P5 terdapat ketegangan antara kebebasan menyampaikan aspirasi dan tuntutan menjaga ketertiban, yang tampak pada visual aksi Kamisan yang bersanding dengan pesan kesantunan (Drexler, 2022). Pada P3, Pancasila hadir sebagai identitas lembaga melalui tagar dan salam Pancasila, bukan sebagai nilai yang diuraikan.

Pembahasan

Cara Nilai Pancasila Disampaikan

Temuan menunjukkan bahwa BPIP menyampaikan Pancasila terutama dengan mengaitkannya pada topik yang dekat dengan keseharian atau agenda lembaga, seperti kereta api, keterbukaan informasi, gotong royong, dan perbedaan selera makan. Lima dari enam unggahan menyebut Pancasila atau nilai sila secara eksplisit. Pola ini sejalan dengan gagasan Entman (2006) bahwa pesan dibentuk melalui pemilihan dan penonjolan aspek tertentu: topik keseharian ditonjolkan terlebih dahulu, lalu dihubungkan dengan sila tertentu, misalnya kereta api dengan sila ketiga dan kelima serta keterbukaan informasi dengan sila keempat. Hubungan tersebut dapat dibaca sebagai pilihan penafsiran BPIP, karena unggahan menghubungkannya melalui pernyataan penghubung dan tidak

menguraikan alasan mengapa topik itu berkaitan dengan sila yang disebut. Pola kalimat "bukan (sekadar) X, melainkan Y" pada lima unggahan memperkuat pembacaan ini karena memperluas makna objek yang biasa, seperti transportasi atau arsip, menjadi nilai atau tanggung jawab bersama.

Unggahan P3 menjadi pengecualian. Sebagai laporan kegiatan humas, unggahan ini tidak menguraikan nilai Pancasila; Pancasila hadir sebagai identitas lembaga melalui tagar dan salam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua unggahan @bpipri berfungsi menyampaikan nilai, dan akun ini juga dipakai untuk mendokumentasikan kegiatan kelembagaan.

Praktik Wacana: Bahasa Akrab dengan Respons Terbatas

Register bahasa dalam keenam unggahan bervariasi: percakapan pada P4 dan P5, pertanyaan langsung kepada pembaca pada P2 dan P6, dan bahasa prosedural pada P3. Menurut Fairclough (1995) gaya bahasa dapat memengaruhi hubungan antara lembaga dan masyarakat. Pada unggahan yang berbahasa akrab, BPIP memosisikan diri sebagai teman bicara, tetapi isinya tetap normatif. Pada P5, misalnya, analogi bubur diaduk atau tidak dipakai untuk menyampaikan standar bagaimana warga seharusnya menyampaikan pendapat di ruang publik.

Respons audiens hampir tidak berbentuk percakapan. Enam dari sembilan komentar berupa emotikon hati dari satu akun, dan ajakan berkomentar pada P5 tidak dijawab secara verbal. Rata-rata 82,8 like pada akun dengan sekitar 103 ribu pengikut, atau sekitar 0,08 persen, searah dengan temuan Siregar (2022) tentang rendahnya keterlibatan pengikut media sosial BPIP. Menariknya, P3 memperoleh like terbanyak (162) meskipun bergaya laporan kegiatan dan tidak mengajak interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa keakraban bahasa tidak otomatis sejalan dengan jumlah like yang lebih tinggi, tetapi dengan enam unggahan dan tanpa data jangkauan, penyebab perbedaan tersebut tidak dapat dipastikan.

Konteks Kelembagaan: Otoritas yang Disampaikan secara Akrab

Pada P5, pesan kesantunan bersanding dengan visual aksi Kamisan. Unggahan mengakui hak warga menyampaikan kritik, tetapi menjadikan adab, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat luas sebagai ukuran kualitas aspirasi. Bahasa yang akrab

membuat standar normatif ini terdengar sebagai ajakan sehingga relasi kuasa bekerja melalui keakraban (adefemiogundimu, 2019). Pada P4, tradisi lokal Bugis dan Minahasa dihimpun dalam satu nilai nasional, dan pada P1, P2, P3, dan P6 nilai yang diharapkan lebih menonjol daripada bukti pelaksanaannya. Temuan-temuan ini dapat dibaca sebagai upaya BPIP menawarkan satu kerangka pemaknaan Pancasila, yang relevan dengan peringatan Mustapa et al., (2024) bahwa tafsir tunggal dapat menyempitkan ruang pemaknaan lain.

Meskipun demikian, data tidak menunjukkan penolakan terhadap tafsir lain. Unggahan P5 justru mengakui hak berpendapat, sehingga penelitian ini tidak dapat menyimpulkan bahwa BPIP menutup ruang tafsir. Dua komentar verbal yang ada juga menunjukkan bahwa sebagian audiens memandang BPIP sebagai lembaga yang dikritik atas perilaku pegawainya (K2) dan sebagai lembaga yang suaranya ditunggu dalam situasi saat ini (K4). Jumlahnya terlalu sedikit untuk digeneralisasi, tetapi cukup menunjukkan bahwa sebagian audiens menerima pesan dengan aktif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini terbatas pada enam unggahan yang dipilih dengan teknik sampel kemudahan dalam periode sekitar tiga minggu, hanya pada Instagram, dan tanpa data dari pengelola akun maupun audiens. Karena itu, temuan menggambarkan cara BPIP mengonstruksi wacana Pancasila dalam unggahan yang dianalisis, bukan dampaknya terhadap audiens. Penelitian lanjutan disarankan memakai kriteria pemilihan unggahan yang ditetapkan sebelum pengumpulan data, mencakup periode yang lebih panjang, serta melengkapi analisis teks dengan wawancara pengelola akun atau analisis respons audiens yang lebih mendalam.

Penelitian selanjutnya dapat melihat bagaimana akun resmi BPIP menanggapi isu publik yang sedang ramai. Caranya, dengan membandingkan waktu unggahan BPIP dengan munculnya isu nasional, serta melihat apakah audiens mengaitkan Pancasila dengan isu tersebut dalam komentar.

Pola kontras “bukan (sekadar) X, melainkan Y” muncul pada lima dari enam unggahan. Peneliti tidak mengetahui siapa yang menulis teks tersebut atau alat apa yang dipakai, termasuk apakah ada alat bantu penulisan, karena tidak ada data dari pengelola

akun. Penelitian lanjutan perlu mewawancarai pengelola akun dan menghitung frekuensi pola yang sama pada unggahan periode sebelumnya.

DAFTAR REFERENSI

adefemiogundimu. (2019). Conversationalisation / Language. In *Discourse Analysis*.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2021). *{BPIP} Optimalkan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Media Sosial*. bpip.go.id.

Drexler, E. (2022). Impunity and Transitional Justice in Indonesia: Aksi Kamisan's Circular Time. *International Journal of Transitional Justice*. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijac010

Entman, R. (2006). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, *43*, 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Etikan, I., Musa, S., & Alkassim, R. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, *5*, 1. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11

Faigley, L., Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2002). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. *College Composition and Communication*, *54*, 318. https://doi.org/10.2307/1512155

Frawley, W. (1993). Norman Fairclough, Discourse and social change. Cambridge: Polity, 1992. Pp. vii + 259. *Language in Society*, *22*(3), 421–424. https://doi.org/DOI: 10.1017/S0047404500017309

Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. *The Qualitative Report*, *8*, 597–607. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2003.1870

Hakim, B., & Rabeh, Z. (2026). Ethics of scientific research in the digital environment. *Journal of Awareness*. https://doi.org/10.26809/joa.3206

Kim, M. S. (2024). Agonizing Pancasila : Indonesia's state ideology and post-foundational political thought. *Journal of Political Ideologies*, *31*, 578–600. https://doi.org/10.1080/13569317.2024.2408230

Mansi, L. (2018). *FUNGSI DAN PERAN TRADISI MAPALUS DALAM MASYARAKAT MINAHASA, SULAWESI UTARA*. *13*, 73–84. https://doi.org/10.31969/alq.v13i2.565

Mullet, D. (2018). A General Critical Discourse Analysis Framework for Educational Research. *Journal of Advanced Academics*, *29*, 116–142. https://doi.org/10.1177/1932202x18758260

Mustapa, H., Zulkarnaen, N., & Yuniarti, P. (2024). SACRALIZATION OF PANCASILA: IDEOLOGY AND REPRESSION IN THE IMPLEMENTATION OF THE PANCASILA IDEOLOGY DEVELOPMENT BOARD (BPIP) AND GUIDELINES FOR THE APPRECIATION AND PRACTICE OF PANCASILA

(P4). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *9*, 52–67. https://doi.org/10.15294/jpi.v9i1.3466

Nabila, L. N., Utama, F. P., Habibi, A. A., & Hidayah, I. (2023). Aksentuasi Literasi pada Gen-Z untuk Menyiapkan Generasi Progresif Era Revolusi Industri 4.0. *Education Research*, *4*(1), 28–36.

Pesurnay, A. (2018). *Pancasila Ideology as a Field of Interpretation*. *1*, 17. https://doi.org/10.29037/digitalpress.41322

Prayoga, A., Mayasari, M., & Lubis, F. (2020). *SARA'S REPRESENTATION IN DETIK.COM NEWS PORTAL (Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis Statement by the Head of BPIP Calling Religion to be the Greatest Enemy of Pancasila)*. *14*. https://doi.org/10.30813/s:jk.v14i2.2234

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*. peraturan.bpk.go.id.

Schrøder, Kim Christian. (1998). Book reviews : Norman Fairclough, Media Discourse. London: Edward Arnold, 1995. 214 pp. ISBN 0-340-63222-4 (hbk); ISBN 0-340-58889-6 (pbk. *European Journal of Cultural Studies*, *1*(2), 285–290. https://doi.org/10.1177/136754949800100209

Simpson, P., Mayr, A., & Statham, S. (2018). Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis. *Language and Power*. https://doi.org/10.4324/9780429468896-13

Siregar, H. (2022). Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 71–82. https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102